

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S

Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270

Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200

Fax. 5347743

=====
KOMPAS Selasa, 25-04-2000. Halaman: 1

GUS DUR BEBAS TUGASKAN LAKSAMANA DAN JUSUF KALLA

Jakarta, Kompas

Lewat sebuah Keputusan Presiden (Keppres), Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membebastugaskan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla. Alasannya, keduanya tidak sepaham lagi dengan Menko Ekuin dan Menteri Keuangan.

Demikian Gus Dur dalam acara dialog dengan para pakar/praktisi hukum di Indonesia, di Jakarta, Senin (24/4).

Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak menjelaskan, Laksamana Sukardi diganti Rozy Munir yang kini menjabat Sekretaris Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Jusuf Kalla diganti oleh Luhut Panjaitan yang sebelumnya menjabat Dubes RI untuk Singapura. Simanjuntak menambahkan, dua menteri yang diberhentikan mendapat tawaran menjadi duta besar.

"Alasan presiden adalah untuk menyeraskan tim ekonomi, karena itu presiden memilih untuk memberhentikan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla," kata Simanjuntak seraya menambahkan, pilihan memberhentikan kedua menteri itu sulit.

Ditanya apakah pemberhentian Laksamana dan Jusuf Kalla dilakukan setelah diadakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Golkar, Simanjuntak mengatakan, "Saya kira sudah." Ditanya apakah masih akan ada lagi menteri yang akan diberhentikan, ia menjawab, "Sampai saat ini tidak ada lagi."

Ke Istana

Sekitar pukul 18.30 kemarin, Laksamana dan Jusuf Kalla dipanggil Gus Dur di Istana Merdeka. Sekitar setengah jam kemudian keduanya keluar. Jusuf Kalla mengatakan, "Saya disuruh memilih, jadi duta besar atau jadi anggota DPA. Tidak, saya mau pulang kampung ke Makassar," ujarnya.

Ia tidak memberi jawaban ketika ditanya alasan pembebasan tugas itu. "Tidak tahulah apa istilahnya, mundur atau disuruh mundur. Kalau dikatakan kabinet tidak kompak karena kami, kan, lebih baik kami mundur," ujarnya. Jusuf Kalla juga mengatakan tidak terkejut diberhentikan dari jabatannya.

Sementara Laksamana lebih dahulu meninggalkan halaman istana tanpa komentar. "Saya tidak usah memberikan komentar dulu," ujarnya. Namun, pekan lalu, ketika isu pergantian dirinya semakin santer, Laksamana mengatakan tidak apa-apa dirinya diganti asalkan oleh orang yang tepat. "Saya sih lurus-lurus saja," katanya kepada Kompas.

"Usai bertugas sebagai Menperindag akan membuat saya lebih leluasa. Makan pun, misalnya, bisa di mana saja, kapan saja. Di warung pinggir jalan pun oke, tak ada yang memperhatikan," kata Jusuf Kalla ketika dihubungi di kediamannya. Setidaknya, tambah Kalla, ia akan bebas dari caci maki, bebas dari demo, dan sejenisnya.

Jusuf Kalla mengatakan, tatkala bersama Laksamana diterima Gus Dur, mereka meminta presiden menjelaskan alasan keduanya mesti diganti dan apa persisnya kesalahan mereka. Penjelasan itu perlu, di antaranya, agar masyarakat tahu duduk masalahnya.

Presiden, menurut Kalla, menjelaskan bahwa ia mendengarkan

semua pihak. Bahwa kabinet ini, khususnya tim ekonomi tidak kompak, padahal salah satu syarat pokok ialah kabinet harus kompak. Pilihannya bisa beberapa variabel. "Pilihan jatuh ke saya dan Laksamana untuk mundur. Gus Dur pun menyatakan, saya dan Laksamana tidak mempunyai kesalahan. Perombakan kabinet ini semata untuk kekompakan. Maka saya dan Laksamana meminta supaya ini dijelaskan kepada masyarakat. Bahwa urusannya adalah masalah kekompakan, bukan suatu kesalahan," katanya.

Sikap DPP PDI

Jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan, Selasa ini DPP akan melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas dua agenda penting berkaitan penggantian Laksamana. Agenda pertama, mempertanyakan langsung kepada Gus Dur alasan sekaligus latar belakang kebijakan itu. Agenda kedua, mempertimbangkan kemungkinan pengesahan garis partai mengenai penarikan kader PDI-P yang masih tersisa di Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Gus Dur-Megawati Soekarnoputri.

Orang-orang PDI-P yang kini menjabat menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menteri Urusan Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf, dan Menteri Pertanian M Prakosa. Sikap PDI-P itu dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Sutjipto. Hal senada dibenarkan Wakil Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung Wibowo.

Sutjipto mengakui belum ada ketetapan soal penarikan mundur kader PDI-P yang tersisa di jajaran kabinet. "Itu belum menjadi garis partai, karena masih perlu dibicarakan dan dibahas dalam forum rapat DPP. Akan tetapi, pemikiran soal penarikan mundur sejumlah kader PDI-P di kabinet memang muncul dan berkembang dalam pembicaraan-pembicaraan di DPP. Untuk itu dalam rapat pengurus DPP nanti, soal itu masuk dalam agenda rapat. Tunggu saja ya," katanya. Ia menegaskan, penggantian Laksamana akan dipertanyakan pula kepada Wapres Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDI-P.

Harus jelas

Ketua MPR Amien Rais menegaskan, pengganti Laksamana dan Jusuf Kalla hendaknya orang yang lebih berkualitas. "Kalau tidak, penggantian itu patut dipertanyakan," katanya.

Amien tidak sepatutnya dengan pendapat bahwa penggantian kedua menteri itu didasarkan karena keduanya tidak dapat bekerja sama dengan anggota kabinet lainnya. "Kalau anak buahnya tidak bisa bekerja sama, seharusnya yang dipertanyakan adalah cara kerja konduktornya. Sebagai dirigen, seharusnya dia dapat memimpin agar anak buahnya bekerja padu, dan in line," ujarnya.

Karena itu, Amien meragukan alasan penggantian adalah karena ketidakmampuan bekerja sama. "Kita bicara kejujuran, kenapa dua anggota kabinet itu diganti. Pada saatnya, yaitu pada moment of truth, akan ketahuan ada apa sebenarnya," ungkapnya.

Dikatakan, dalam banyak kesempatan, Gus Dur menyatakan anggota kabinetnya akan diganti jika yang bersangkutan secara hukum terbukti bermasalah. "Dua tokoh itu saya tahu tidak punya masalah hukum. Saya sangat bersimpati pada dua tokoh yang telah dipinggirkan ini. Kalau penggantinya secara kualitas berada di bawah mereka, maka pada moment of truth akan ketahuan ada apa sesungguhnya," kata Amien.

Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan, Gus Dur harus menjelaskan alasan penggantian kedua menteri itu. "Bisa saja Gus Dur mengganti menteri-menterinya bila dianggap tidak performed. Namun, untuk mengatakan menteri itu performed atau tidak dalam waktu singkat, apakah sudah cukup, karena kan kabinet baru berjalan enam bulan. Paling tidak kita perlu satu tahun untuk bisa menilai performed tidaknya seorang menteri," katanya.

Dipertanyakan

Anton J Supit, seorang pengusaha yang juga anggota Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), menilai, kalangan pengusaha

terutama investor asing, pasti mempertanyakan pergantian dua menteri itu. "Masyarakat bisnis pasti mempertanyakan alasan yang tepat soal pergantian itu, karena sebetulnya orang seperti Laksamana itu bisa berbuat banyak," katanya. Ia menyebutkan, kinerja Laksamana terlihat saat menggerakkan kembali Prakarsa Jakarta dan sejumlah pengembangan di dalam kementerian yang dipimpinnya.

"Untuk mengetahui dampaknya, kita bisa melihat nilai rupiah terhadap dollar AS. Kalau negatif, hal itu menunjukkan alasan pergantian ini kurang tepat. Namun, kita lihat saja besok (Selasa ini)," kata Supit.

Pengamat ekonomi lainnya berpendapat, pergantian dua menteri bidang ekonomi makin menunjukkan intervensi kepentingan politik dalam bidang ekonomi, dan diabaikannya pertimbangan profesionalisme dalam menetapkan figur-figur tim ekonomi di kabinet. Pendapat itu diutarakan Didik J Rachbini dan Tony Prasetyantono.

Didik menyatakan, Gus Dur seharusnya berhati-hati dalam bertindak agar prospek ekonomi dan politik menjadi lebih pasti. "Akan tetapi, dengan mengganti Jusuf Kalla dengan militer, dan Laksamana Sukardi dengan Rozy Munir, justru semakin menjauhkan kepastian itu," katanya.

"Kalau begini terus, satu per satu menteri kabinet akan rontok. Gebrakan-gebrakan Gus Dur tidak pernah memperhitungkan dampaknya, dan gaya berkelitnya akan menjadi taruhan besar bagi bangsa ini," tambah Didik.

Ia juga menilai, mengganti kedua orang itu dengan figur yang "diragukan" oleh pasar justru membuat ketidakpastian pasar.

Sementara Tony menilai, Laksamana adalah menteri yang paling siap di bidangnya. Namun, belakangan, setelah Rozy Munir diangkat menjadi sekjen di BUMN, yang terjadi justru dualisme kepemimpinan di Kantor Meninves/BUMN.

Laksamana sebenarnya butuh dukungan dari Rozy sebagai sekjen, tetapi yang terjadi justru persaingan dalam memasukkan orang-orang di BUMN. "Ini yang membuat Laksamana tidak bisa bekerja maksimal. Ini juga yang membuat Dana Moneter Internasional (IMF) kesal. Kalau sekarang Laksamana diganti Rozy, saya pesimistis situasi akan makin baik. Selain itu, kita tidak pernah tahu track record kemampuan Rozy Munir," ujar Tony.

Mengenai pengganti Jusuf Kalla, yakni Luhut Panjaitan, Tony menyatakan, meski sejak awal dia meragukan kemampuan Kalla sebagai Menperindag, dengan ditunjuknya Panjaitan sebagai penggantinya, hal itu justru makin membuat skeptis keadaan menjadi makin baik.

(mon/ely/as/bw/gun/osd/pep/mar)

Foto: 1/rat

Jusuf Kalla

Foto: 1/ed

Laksamana Sukardi